



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2024-2026



BADAN PENGHUBUNG ROVINSI KALIMANTAN BARAT



(021) 8354284,8319083



www.penghubung.kalbarprov.go.id



Jl. Salak No. 32 Guntur, Setiabudi
Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat 2024-2026 dapat diselesaikan.

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 mengamanatkan bagi seluruh daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan berakhirnya masa jabatan pada tahun 2022 atau 2023 untuk melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Hal tersebut menjadi Dasar bagi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan Penyusunan Renstra Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Startegis 2024-2026 ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan dalam penentuan program, Kegiatan Dan sub Kegiatan tela mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 ini bermanfaat bagi kita semua dan dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan Pembangunan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta, saran dan kritik sangat di harapkan guna perbaikan program, kegiatan serta penyempurnaan RENSTRA Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat kedepan.

Jakarta, 31 Maret 2023

Kepala Badan Penghubung
Provinsi Kalimantan Barat



ABDUL GANI,S.H.

Pembina (IV/a)

NIP.197208211997031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I	4
2.1 Latar Belakang.....	4
2.2 Landasan Hukum.....	5
2.3 Maksud Dan Tujuan.....	6
2.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	8
3.1 Gambaran Umum Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.....	8
3.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
3.2 Sumber Daya Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	13
3.2.1 Sumber Daya Manusia	13
3.2.2 Asset/Modal.....	14
3.2.3 Pendapatan Asli Daerah.....	18
3.2.4 Pengembangan Kapasitas Organisasi	19
3.3 Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	20
3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.....	26
BAB III	27
4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	27
4.2 Telaahan Visi ,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.	Error! Bookmark not defined.
4.3 Telaahan Renstra KIL dan Renstra.....	Error! Bookmark not defined.
4.4 Penentuan Isu-isu Strategis	28
BAB IV	30
5.1 Tujuan & Sasaran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.....	30
BAB V	31
6.1 Strategi Dan Arah Kebijakan.....	31
BAB VI	32
7.1 Rencana program dan kegiatan.....	32
BAB VII	38
BAB VIII	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi SDM Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.....	13
Tabel 2.2 Aset Kendaraan Bermotor.....	15
Tabel 2.3 Aset Tanah.....	15
Tabel 2.4 Aset Gedung dan bangunan.....	16
Tabel 2.5 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.....	18
Tabel 2.6 Penerimaan Pendapatan Daerah Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Di Jakarta	18
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.....	21
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	25
Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penghubung	30
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	31
Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikator Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat	33
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.....	8
Gambar 2.2 Penerimaan Pendapatan Daerah Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Di Jakarta	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 akan berakhir pada Tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur akan dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024- 2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu Tahun 2024 sampai dengan 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024- 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah, untuk selanjutnya dijabarkan kedalam kebijakan dan program-program prioritas yang akan dicapai. Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Strategis juga merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah.

Hubungan RENSTRA Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dokumen Perencanaan lainnya terlihat dari keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam RENSTRA dengan mengacu pada **UU Nomor 25 Tahun 2004** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. RENSTRA Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat mengacu Pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Bar
2. RENSTRA Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dijadikan Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Daerah Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya.
3. Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penghubung yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD dan rincian APBD.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan agar Program perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan agar Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026, arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026).

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Peraturan Perundang — Undang sebagai berikut:

- 1) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Awal Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah serta Tata Cara Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 4) Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
- 5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
- 6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
- 7) Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat bertujuan sebagai arah dan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2024 - 2026 oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dan amanah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat juga bermanfaat sebagai alat kontrol bagi setiap sub bagian dan sub bidang serta kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat. Manfaat lainnya yang terkait dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan penghubung Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun.
- 2) Sebagai arah kebijakan dalam melakukan koordinasi dengan instansi —instansi terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 ini, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi gambaran pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat, antara lain struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Penghubung, sumber daya Badan Penghubung, capaian kinerja pelayanan Badan Penghubung serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penghubung, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra KIL dan Renstra Badan Penghubung serta Penentuan Jsu-jsu Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang Secara Langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Barat

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

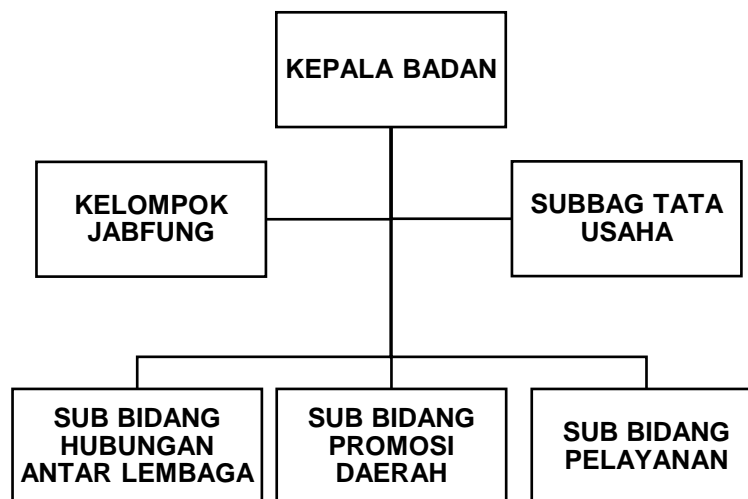
2.1 Gambaran Umum Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat, Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
4. Sub Bidang Promosi Daerah
5. Sub Bidang Pelayanan
6. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

2.1.1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan penghubung pemerintah Provinsi dengan Instansi Pemerintah/Lembaga-Lembaga di Jakarta;
2. Mewakili Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengikuti rapat yang tidak bersifat teknis di Jakarta;

3. Fasilitasi dan pendayagunaan asrama mahasiswa dan asset Pemerintah Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
4. Penunjang kegiatan Promosi;
5. Pengelolaan Anjungan Daerah;
6. Pemberian Pelayanan penunjang kegiatan protokoler;
7. Melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dipimpin Oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun fungsi dari Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 126 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

1. Perumusan program kerja di Bidang Penghubung;
2. Perumusan kebijakan di Bidang Penghubung;
3. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penghubung;
4. Pengkoordinasian di Bidang Penghubung;
5. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di Bidang Penghubung sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penghubung;
7. Pelaksanaan administrasi di Bidang Penghubung;
8. Penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan Lembaga-lembaga lainnya di Jakarta dan daerah lainnya;
9. Pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah Provinsi di Jakarta dan daerah lainnya;
10. Pembinaan masyarakat, mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
11. Pengelolaan asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan asrama mahasiswa dan asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
13. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Penghubung;
14. Pengelolaan anjungan daerah Provinsi Kalimantan Barat Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta dan daerah lainnya;
15. Penunjang pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan pariwisata berdasarkan kebijakan Gubernur;
16. Pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legislative Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;

17. Penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

18. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di Bidang Penghubung sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat, struktur Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

a. Kepala Badan

Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan badan di bidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. Penetapan program kerja di Bidang Hubungan Antar Lembaga, Promosi Daerah serta Pelayanan;
2. Perumusan kebijakan di Bidang Hubungan Antar Lembaga, Promosi Daerah serta Pelayanan;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di Bidang Penghubung Daerah;
4. Pembinaan dan pengarahan kegiatan di Bidang Hubungan Antar Lembaga, Promosi daerah, serta Pelayanan;
5. Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penghubung sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di Bidang Hubungan Antar Lembaga, Promosi Daerah, serta Pelayanan;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Penghubung;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di Bidang Penghubung Daerah;
10. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di Bidang Penghubung Daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana kerja, administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan keuangan, asset dan administrasi umum.

Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan penyetaraan program kerja Badan, serta tata usaha keuangan, asset, aparatur, administrasi umum;
2. Pelaksanakan tata usaha keuangan;
3. Pelaksanakan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi dan tatalaksana Badan, penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan;
4. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan;
5. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan asset serta rumah tangga Badan;
6. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), DAN Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Penghubung;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Program Kerja Badan;
8. Pelaksanakan tugas lain bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala Badan.

c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas mengumpul, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis, melaksanakan fasilitasi hubungan antar Pemerintah Provinsi dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga masyarakat serta swasta lainnya di Jakarta dan daerah lainnya serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Bidang Hubungan Antar Lembaga;
3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Bidang Hubungan Antar Lembaga di Jakarta dan daerah lainnya;
4. Pelaksanaan hubungan dengan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah lainnya serta instansi terkait lainnya di Jakarta dan daerah lainnya;
5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Hubungan Antar Lembaga;
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas Eksekutif dan Legislative Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jakarta dan daerah lainnya;
7. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Hubungan Antar Lembaga;
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang hubungan Antar Lembaga;

9. Pelaksanaan Tugas lain di bidang Hubungan Antar Lembaga yang diserahkan oleh Kepala kantor.

d. Sub Bidang Promosi Daerah.

Sub Bidang Promosi Daerah mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di Bidang Promosi Daerah yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan daerah lainnya serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bidang Promosi Daerah mempunyai fungsi

1. Penyusunan Rencana Kegiatan di Sub Bidang Promosi Daerah;
2. Pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan promosi daerah;
3. Penyiapan bahan —bahan promosi Daerah;
4. Pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan informasi sebagai bahan promosi daerah di Jakarta dan daerah lainnya;
5. Memfasilitasi kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
6. Pengelolaan sarana dan prasarana promosi melalui media elektronik dan non elektronik;
7. Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan di bidang promosi daerah;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Promosi Daerah;
9. Pelaksanaan tugas lain di Bidang Promosi Daerah yang diserahkan oleh Kepala Badan.

e. Sub Bidang Pelayanan.

Sub Bidang Pelayanan mempunyai tugas melakukan urusan protokoler dan perjalanan dinas terhadap Pejabat Eksekutif, Legislatif Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta memfasilitasi pendayagunaan mess asrama dan asrama mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan Daerah lainnya. Untuk melaksanakan Program Kerja Sub Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pelayanan;
2. Pelaksanaan pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat di Jakarta dan Daerah lainnya;
3. Penyediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
4. Pembinaan masyarakat dan mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan Daerah lainnya;
5. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
6. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelayanan;

7. Pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Penjelasan tentang Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Sub Bagian tata Usaha dan secara operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bidang;
3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu;
4. Jenis Jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh beberapa hal antara lain;

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara umum jumlah pegawai di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan awal Januari 2023 sebanyak 26 pegawai. Pejabat Struktural di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Badan, 4 (empat) orang Kepala Sub Bidang , serta 21 orang staf , dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Klasifikasi SDM Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai	Pangkat Golongan	Jumlah Pegawai	Pejabat Struktural dan Fungsional	Jumlah Pejabat Struktural
1	2	3	4	5	6	7
1	S2	2	Pembina (IV/a)	2	Fungsional Umum	
2	S1	9	Pembina Tk I (IV/b)	1	Struktural	1
			Penata Tk. I (III/d)	4	Struktural	4
			Penata (III/c)	1		
			Penata Muda Tk.I (III/b)	3		
3	DIPLOMA	8	Penata Muda Tk.I (III/b)	3	Fungsional Umum	

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai	Pangkat Golongan	Jumlah Pegawai	Pejabat Struktural dan Fungsional	Jumlah Pejabat Struktural
1	2	3	4	5	6	7
			Penata Muda (III/a)	4		
			Pengatur Tk. I (II/d)	1		
4	SLTA	11	Penata Muda Tk.I (III/b)	3	Fungsional Umum	
			Penata Muda (III/a)	1	Fungsional Umum	
			Pengatur Muda Tk. I (II/b)	5	Fungsional Umum	
			Pengatur Muda (II/a)	2	Fungsional Umum	
5	SD	1	Juru Tk. I (I/d)	1	Fungsional Umum	

Tanggungjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat tidak hanya dilaksanakan di wilayah administrasi Jakarta, akan tetapi juga bertanggungjawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Asrama-Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat, serta Anjungan Kalimantan Barat yang berada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang berada dalam ruang lingkup tugas yang diamanatkan kepada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

2.2.2 Asset/Modal

Penyusunan Neraca Asset menjadi kata kunci dalam pengelolaan asset oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat, sehingga seluruh asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat dimanfaatkan secara maksimal dan optimal bagi pembangunan masyarakat Kalimantan Barat .Asset-asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dikelola oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat secara umum dapat dibagi menjadi asset bergerak dan asset yang tidak bergerak. Asset yang bergerak terutama dimanfaatkan untuk mendukung mobilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yakni mobil dan motor, Sedangkan asset yang tidak bergerak meliputi tanah,bangunan beserta isinya yang mendukung fungsi bangunan tersebut, aset-aset tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

2.2.2.1 Aset Kendaraan

Tabel 2.2 Aset Kendaraan Bermotor

KODE SKPD	URAIAN	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	VOLUME/ JMLH BARANG	SATUAN	KONDISI	KETERANGAN
01	02	03	04	05	06	07	10
Alat-alat angkutan Darat Bermotor							
1	Mobil Jeep	Toyota, Fortunner	2008	1	Unit	1	B. 2698 HQ
2	Mobil Sedan	Toyota Camry	2010	1	Unit	1	B.1094 SQA
3	Mobil Sedan	Nissan Teana	2010	1	Unit	1	B. 1232 SQA
4	Mobil Jeep	Mitubishi Pajero	2012	1	Unit	1	B. 1178 SQH
5	Mobil Station Wagon	Toyota Innova	2014	1	Unit	1	B. 1546 SQ

2.2.2.2 Aset Tanah

Tabel 2.3 Aset Tanah

KODE SKPD	URAIAN	LUAS	SATUAN	TAHUN PEROLEHAN	VOLUME/ JMLH BARANG	KONDISI	FUNGSI	LOKASI	KET.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
09.01	Badan Penghubung Prov. Kalbar		M2						
1	Tanah Asrama Mahasiswa	199	M2	1981	1	1	Asrama Putri	Jl. Kidang Bandung	
2	Tanah Asrama Mahasiswa	994	M2	1982	1	1	Asrama Putra	Jl. KH. Ahmad Dahlan Jakarta	
3	Tanah Asrama Mahasiswa	2769	M2	1982	1	1	Asrama Putra/I	Jl. Bintaran Yogyakarta	
4	Tanah Asrama Mahasiswa	1650	M2	1984	1	1	Asrama Putra	Jl. Batuhulung Bogor	
5	Tanah Asrama Mahasiswa	151	M2	1989	1	1	Asrama Putra	Jl. Bareng Raya Malang	
6	Tanah Kantor Badan Penghubung Prov. Kalbar	853	M2	1995	1	1	Kantor dan Mess	Jl. Salak Jakarta	
7	Tanah Asrama Mahasiswa	148	M2	2000	1	1	Asrama Putri	Jl. KH. Ahmad Dahlan Jakarta	
8	Tanah Asrama Mahasiswa	298	M2	2000	1	1	Asrama Putri	Komplek Diniyo Permai Malang	

KODE SKPD	URAIAN	LUAS	SATUAN	TAHUN PEROLEHAN	VOLUME/ JMLH BARANG	KONDISI	FUNGSI	LOKASI	KET.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
9	Tanah Asrama Mahasiswa	300	M2	2002	1	1	Asrama Putra	Jl. Barend Raya Malang	
10	Tanah Asrama Mahasisw2005a	301	M2	2002	1	1	Asrama Putra	Jl. Anggur Solo	
11	Tan2014ah Asrama Mahasiswa	348	M2	2002	1	1	Asrama Putra II	Jl. Kaliurang Yogyakarta	
12	Tanah Asrama Mahasiswa	1129	M2	2005	1	1	Asrama Putra II	Jl. Picung Bandung	
13	Tanah Sebelah Asrama Mahasiswa	513	M2	2014	1	1		Klitteren Gondokusuma Yogyakarta	

2.2.2.3 Aset Gedung dan Bangunan

Tabel 2.4 Aset Gedung dan bangunan

Kode SKPD	uraian	Luas	Satuan	Tahun Perolehan	Volume/ Jmlh Barang	Kondisi	Fungsi	Lokasi	Ket.
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Gedung dan Bagunan Lainnya									
09.01	Badan Penghubung Prov. Kalbar								
1	Bangunan Asrama	2769	M2	1983	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. Bintaran Yogyakarta	
2	Bangunan Asrama	151	M2	1989	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. Barend Raya Malang	
3	Bangunan Gedung Kantor dan Mess	764	M2	1995	1	B		Jl. Salak No. 32	
4	Bangunan Asrama	148	M2	2000	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. Picung Bandung	
5	Bangunan Asrama	409	M2	2002	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. Kendang VI Semarang	
6	Bangunan Asrama	301	M2	2002	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. Anggur Solo	
7	Bangunan Asrama	199	M2	2003	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. Kidang Bandung	
8	Bangunan Asrama	298	M2	2004	1	B	Asrama Mahasiswa	Komplek Dinoyo Permai Malang	
9	Bangunan Asrama	1129	M2	2005	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. Picung Bandung	
10	Rolling Door Garasi	5	M2	2005	1	B	Rolling Door Garasi Mobil Samping	Jl. Salak No. 32	

11	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	40	M2	2009	1	B	Gudang	Jl. Salak No. 32
12	Bangunan Garasi / Pool Permanen	300	M2	2009	1	B	Garasi	Jl. Salak No. 32
13	Pagar	200	M2	2010	1	B	pagar	Jl. Salak No. 32
14	Bangunan Asrama	994	M2	2011	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. KH. Ahmad Dahlan Jakarta
15	Bangunan Asrama	1320	M2	2011	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. Batuhulung Bogor
16	Gedung Pos Jaga Permanen	6	M2	2012	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. Salak No. 32
17	Bangunan Asrama	546	M2	2013	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. Bintaran Yogyakarta
18	Bangunan Garasi / Pool Permanen	75	M2	2015	1	B	Asrama Mahasiswa	Bangunan Garasi / Pool Permanen
19	Bangunan Asrama		Buah	2015	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. KH. Ahmad Dahlan Jakarta
20	Bangunan Asrama		Buah	2015	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. Anggur Solo
21	Bangunan Asrama		Buah	2015	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. Kendeng Semarang
22	Bangunan Asrama		Buah	2015	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. Batuhulung
23	Bangunan Asrama		Buah	2015	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. KH. Ahmad Dahlan Jakarta
24	Bangunan Asrama		Buah	2015	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. Bintaran Yogyakarta
25	Gudang		M2	2011	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. Salak No. 32
26	Pagar		M2	2011	1	B	pagar	Jl. Salak No. 32
27	Asrama Putra Jakarta		M2	2011	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. KH. Ahmad Dahlan Jakarta
28	Asrama Putra Jakarta		M2	2011	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. Kayu Manis Jaktim
29	Asrama Putra Bogor		M2	2011	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. Margajaya Bogor
30	Polding Gate		M2	2011	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. Salak No. 32
31	Bangunan Pos Keamanan		M2	2012	1	B	Asrama Mahasiswa	Jl. Salak No. 32

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah

Gedung Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat selain berfungsi sebagai pusat kegiatan administrasi, juga dimanfaatkan sebagai Mess Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan pemungutan atas jasa sewa kamar yang diberikan. Uang sewa kamar inilah yang menjadi tambahan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu ada pula penyewaan Rumah Panjang Anjungan Kalbar TMII dan Gedung Anjungan Kalbar TMII yang juga menjadi tambahan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gambaran umum tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut.

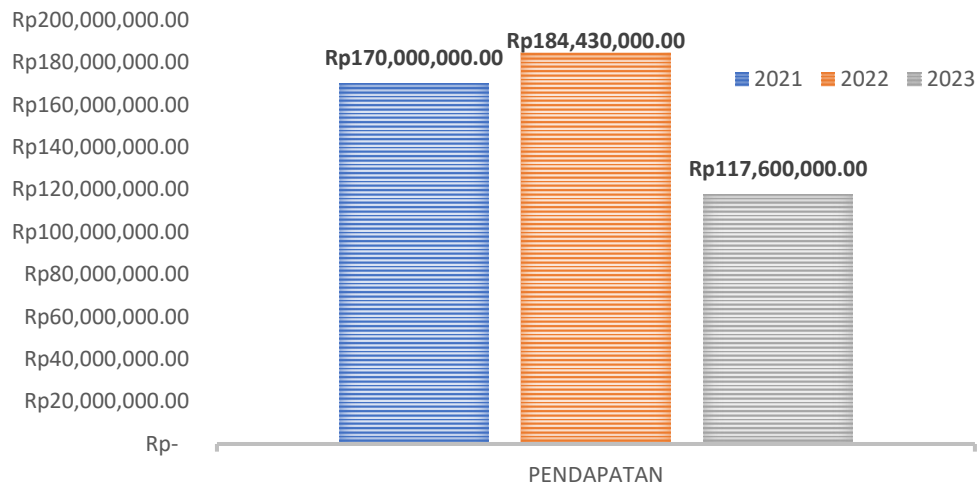
Tabel 2.5 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Kamar	Satuan	Tarif
1	Kamar VIP-A	Perkamar/hari	Rp. 200.000,-/kamar
2	Kamar VIP-B	Perkamar/hari	Rp. 200.000,-/kamar
3	Kamar VIP-C	Perkamar/hari	Rp. 125.000,-/kamar
4	Kamar Standar	Perkamar/hari	Rp. 75.000,-/kamar
5	Rumah Panjang Anjungan TMII	Perkamar/hari	Rp. 250.000,-/kamar
6	Gedung Anjungan Kalbar TMII	Perhari	Rp. 2.000.000,-/hari
7	Aula Asrama Mahasiswa Putra Rahadi Oesman Jakarta	Perhari	Rp. 1.000.000,-/hari

Kontribusi pendapatan dari jasa sewa kamar Mes Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat, Rumah Panjang Anjungan Kalbar TMII, Gedung Anjungan Kalbar TMII dan Aula Asrama Mahasiswa Putra Rahadi Oesman Jakarta bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Penerimaan Pendapatan Daerah Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Di Jakarta

TAHUN	TOTAL PENERIMAAN
2021	170.000.000,00
2022	184.430.000,00
2023	117.600.000,00
Rata-rata	157.343.333.33



Gambar 2.2 Penerimaan Pendapatan Daerah Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Di Jakarta

Rata-rata Pendapatan Asli Daerah *(PAD) yang berasal dari Retribusi Sewa Kamar, Rumah Panjang Anjungan Kalbar TMII, Gedung Anjungan Kalbar TMII dan Aula Asrama Mahasiswa Putra Rahadi Oesman Jakarta dalam kurun Waktu 2021-2023 adalah Rp.471.930.000,00. Melihat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 sebesar Rp. 184.430.000,00 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) , sehingga pendaatan asli daerah masih dapat di optimalkan.

2.2.4 Pengembangan Kapasitas Organisasi

Berdasarkan Pasal 4 point l dan m, Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi mengelola Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya, dan mengelola Anjungan Provinsi Kalimantan Barat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ,selain mengelola Asrama dan Anjungan, Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi membjna masyarakat, mahasiswa Kalimantan Barat yang ada di Jakarta.

Pasal 16 huruf d dan e, Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016, pembinaan masyarakat dan mahasiswa serta pengelolaan asrama mahasiswa dan asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya menjadi tugas dan fungsi dari Sub Bidang Pelayanan Badan penghubung Provinsi Kalimantan Barat. Disisi lain Sub Bidang Pelayanan juga menjalankan tugas dan fungsi untuk pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legislatif, sehingga Sub Bidang ini menjalankan tugas dan fungsi yang bersifat pelayanan internal yang berkaitan dengan kepentingan eksekutif dan legislatif serta pelayanan eksternal yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Dalam rangka pengembangan struktur organisasi, beban tugas yang diamanatkan pada Sub Bidang Pelayanan ini hendaknya dapat dilakukan evaluasi, sehingga struktur organisasi dari Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat ini

dapat di bagi menjadi bagian yang dilaksanakan tugas dan fungsi pelayanan internal dan eksternal.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat periode sebelumnya yaitu tahun anggaran 2013 – 2018, dapat terlihat dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan, sebagai berikut:

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

No	PROGRAM	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
I	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG																	
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	-	-	852.718.419	833.078.531	807.262.500	-	-	802.111.539	797.983.365	797.355.549	-	-	100%	100%	750%		
2	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	-	-	10.480.000	205.180.000	55.000.000	-	-	10.480.000	200.609.450	47.536.365	-	-	95%	96%	99%		
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	434.960.000	567.090.000	600.860.000	407.931.273	501.877.793	424.960.000	550.422.273	588.679.826	368.873.156	446.118.713	-	-	100%	100%	100%		
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.112.000	52.524.000	54.821.208	26.373.894	36.933.208	46.252.524	49.429.373	50.001.911	21.889.301	25.719.000	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	34.956.894	-	27.103.894	-	-	31.679.826	-	11.946.908	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.444.000	32.450.000	34.274.894	20.705.947	-	27.237.059	29.382.400	31.373.894	17.299.740	-	-	-	100%		100%		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.135.000	43.200.000	45.193.208	27.291.894	38.465.033	39.705.947	39.498.500	43.550.918	25.277.041	17.194.354	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	3.683.182.863	3.358.607.858	3.491.619	-	-	3.414.081.929	3.191.522.596	3.196.572.417	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	173.655.184	163.659.447	158.521.047	-	-	173.100.000	163.440.000	158.520.000	-	-	100%	100%	100%		
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	19.513.894	24.277.947	29.035.894	-	-	19.250.000	23.829.100	11.321.113	100%	100%	93%	96%	92%		

No	PROGRAM	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
8	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	25.534.085	52.714.000	32.000.000	-	-	25.534.085	43.094.108	30.325.608	-	-	100%	100%	100%		
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	11.985.600	-	-	-	-	11.458.019	-	-	-	-	100%		
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	12.066.000	5.029.000	-	-	-	10.303.848	3.912.046	-	-	-	100%	40%		
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	10.950.000	-	-	-	-	10.267.800	-	11.286.556	-	-	100%		72%		
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	36.472.560	27.533.624	36.463.400	-	-	31.826.000	22.002.398	36.398.273	-	-	100%	100%	100%		
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	62.405.040	53.608.318	56.792.100	-	-	58.660.737	43.543.394	55.339.807	-	-	100%	100%	100%		
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	19.591.771	20.641.926	24.588.200	-	-	19.537.152	19.579.969	24.405.443	-	-	94%	82%	98%		
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	41.600.000	31.739.800	50.648.400	-	-	38.272.000	24.623.902	44.467.976	-	-	100%	100%	100%		
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	55.041.875	45.313.431	41.537.110	-	-	52.840.200	35.952.976	40.571.499	-	-	96%	80%	98%		
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	126.787.788	79.563.947	126.957.788	-	-	117.098.958	76.397.257	126.956.102	-	-	93%	97%	100%		
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	11.375.000	-	51.848.000	-	-	11.014.000	-	51.836.901	-	-	100%		100%		
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	54.135.309	146.083.422	61.690.100	-	-	51.931.865	142.597.000	57.855.092	-	-	96%	98%	94%		

No	PROGRAM	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	6.980.250	6.980.250	6.980.250	-	-	6.701.040	5.588.200	5.652.700	-	-	96%	81%	81%		
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	416.986.944	382.956.000	436.986.944	-	-	383.627.989	354.068.765	416.068.322	-	-	90%	93%	96%		
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	7.000.000	3.000.000	8.500.000	-	-	6.160.000	500.000	8.395.000	-	-	90%	17%	99%		
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	23.000.000	1.280.000	5.000.000	-	-	22.901.120	1.280.000	5.000.000	-	-	90%	96%	98%		
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	149.676.374	225.329.142	443.233.759	-	-	137.702.265	215.183.450	440.282.551	-	-	93%	96%	100%		
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	13.750.000	13.750.000	21.000.000	-	-	13.628.100	12.584.000	21.000.000	-	-	100%	92%	100%		
27	Pemeliharaan Mebel	-	-				-	-				-	-					
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	25.250.000	38.703.425	54.997.025	-	-	21.810.000	33.962.000	54.609.000	-	-	87%	88%	100%		
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-		35.000.000	234.881.500	-	-		34.360.000	234.120.241	-	-		99%	100%		
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	8.000.000	6.500.000	15.000.000	-	-	7.280.000	4.676.561	14.808.025	-	-	91%	72%	99%		
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	2.900.000	2.900.000	2.590.000	-	-	2.900.000	2.840.000	2.590.000	-	-	100%	98%	100%		

Pada dasarnya realisasi Renstra Tahun 2024 - 2026 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat hampir semua program dan kegiatan 100% terealisasi hal ini dikarenakan kerjasama yang baik antar pegawai di dalam jajaran kepegawaian Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat ,dapat terlihat dari tabel pencapaian Kinerja Pelayanan OPD dari Tahun 2019 sd 2023 antara lain:

- Program Pelayanan Penghubung dapat berjalan dengan baik dengan tingkat capaian 100%.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada umumnya dapat berjalan dengan tingkatan capaian kinerja mendekati 100%

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

No	OPD	Pagu Anggaran					Realisasi					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Badan Penggubung prov Kalbar	6.626.696.000	6.878.854.500	7.157.445.925	6.252.770.076	6.886.085.948	6.164.623.754	6.297.976.271	6.681.009.554	5.892.581.577	5.892.581.577	93,03%	91,56%	93,3%	94,24%	93,08%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat menghadapi tantangan antara lain: sarana dan prasarana yang belum maksimal seperti bangunan baik kantor, mess dan Anjungan Kalimantan Barat yang masih memerlukan rehabilitasi, beberapa kendaraan yang kondisinya harus diperbaiki dan sumber daya manusia yang masih perlu diikutsertakan didalam diklat dan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pelayanan.

Apabila tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi, banyak peluang pelayanan yang akan dikembangkan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat seperti dengan kamar mess direhab atau ditata ulang tamu mess akan semakin banyak yang berminat untuk menginap, kendaraan melayani tamu mess ditambah jumlahnya sehingga banyak tamu yang akan terlayani, sarana dan prasarana yang bersifat dengan pelayanan ditingkatkan, sumber daya manusia mendapat pendidikan tentang pelayanan sehingga pada akhirnya dalam jangka panjang pelayanan yang diberikan akan meningkat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

Bila dipetakan, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat. Beragam persoalan tersebut bisa berupa hambatan (kendala) kelemahan dan kekuatan organisasi isu-isu strategis ,yang dapat diantisipasi dalam bentuk program dari kegiatan adalah sebagai berikut.

a. Perkembangan Teknologi Informasi

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi,koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dapat langsung dilakukan dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga masyarakat serta swasta lainnya di Jakarta dan daerah lainnya.

Untuk mengimbangi perkembangan teknologi informasi ini, Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat harus terus mengembangkan Jejaring Kerja (networking) sehingga dapat terus meningkatkan kualitas dukungan fasilitasi hubungan antar Pemerintah Kabupaten/Kota seKalimantan Barat dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga masyarakat serta swasta lainnya di Jakarta dan daerah lainnya.

b. Konsolidasi Masyarakat dan Mahasiswa Kalimantan barat di Pulau Jawa

Masyarakat dan mahasiswa asal Kalimantan Barat di Pulau Jawa harus dipandang sebagai suatu potensi yang dapat bernilai strategis bagi pembangunan di Kalimantan Barat. Masyarakat asal Kalimantan Barat di Pulau Jawa tentunya mempunyai networking tersendiri didalam kehidupannya.Diantara networking — networking yang terbentuk tersebut mungkin saja akan bernilai strategis bagi pembangunan di Kalimantan Barat. Mahasiswa asal Kalimantan Barat di Pulau Jawa juga merupakan potensi yang dapat bernilai strategis bagi pembangunan Kalimantan Barat.

Dengan menyumbangkan pemikiran yang sifatnya untuk membangun daerah kedepannya lebih baik. Alumni Mahasiswa asal Kalimantan Barat di Pulau Jawa diharapkan dapat menjadi pioner-pioner atau penerus tongkat estafet bagi pembangunan di Kalimantan Barat.

Peran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat menjadi sangat strategis untuk melaksanakan konsolidasi ini sehingga networking pembangunan di Kalimantan Barat harus dikembangkan secara profesional dengan semangat kekeluargaan.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan yang secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD secara umum serta memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat disusun isu-isu strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat. Untuk merumuskan analisa strategis digunakan teknik analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat).

1. Kekuatan (Strength)

- a. Memiliki Tupoksi yang jelas, yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016
- b. Memiliki kerjasama dan koordinasi yang baik dengan mitra kerja di Jakarta serta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- c. Memiliki rencana dan program kerja yang sudah tersusun rapi

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Kurang efektifnya sinkronisasi program dan kegiatan dengan OPD di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kab/Kota se-Kalimantan Barat sehingga pelaksanaan program tidak optimal
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana
- c. Kurangnya Aparatur sebagai SDM yang dapat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung
- d. Belum optimalnya PAD dari sewa kamar Mess Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat
- e. Belum optimalnya pendayagunaan Anjungan Kalimantan Barat di Taman Mini Indonesia Indah sebagai Show Window bagi pariwisata dan budaya Kalimantan Barat.

3. Peluang (Opportunity)

- a. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan para pejabat eksekutif dan legislative di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjalin networking secara langsung ke lembaga — Lembaga Pemerintahan di Jakarta.
- b. Perkembangan teknologi informasi membuat SDM lebih berperan aktif dalam Promosi Daerah.

4. Ancaman (Threat)

- a. Kemajuan teknologi informasi yang menimbulkan persaingan pelayanan dan pemasaran hotel — hotel di Jakarta yang dapat menurunkan tingkat hunian bagi Mess Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat karena kemajuan teknologi informasi

- b. Penurunan pendayagunaan asrama asrama mahasiswa karena kurangnya pengawasan terhadap bangunan dan fasilitas di asrama mahasiswa tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan & Sasaran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 bertujuan untuk memberjkan arah dari penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sub Bidang Promosi Daerah dan Sub Bidang Pelayanan sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tujuan yang jelas dan selaras dengan tujuan pembangunan.

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penghubung

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran		
			2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi padapelayanan publik		Nilai SAKIP	BB Nilai	A Nilai	AA Nilai
		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	B Nilai	A Nilai	AA Nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat	BB Nilai	A Nilai	AA Nilai
	Meningkatnya kualitas pelayanan penghubung pemerintah daerah provinsi kalbar di jakarta dan daerah lainnya	Persentase fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD dan pejabat daerah	100 %	100 %	100 %
		Persentase PAD atas pemanfaatan saranaprasarana Badan Penghubung	200 %	250 %	300 %
		Persentase koordinasi antar lembaga dengan K/L lainnya	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya promosi daerah	Jumlah kegiatan promosi daerah, pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	12 Kali	18 Kali	24 Kali
	Meningkatnya kinerja pelayanan Badan Penghubung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung	Nilai SAKIP	BB Angka	A Angka	AA Angka
		Indeks RB	BB Nilai	A Nilai	AA Nilai

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD, maka akan dijalankan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : -			
Misi : -_*			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan penghubung pemerintah daerah provinsi kalbar di jakarta dan daerah lainnya	Pelayanan Penghubung	Terlaksananya Pelayanan Penghubung
	Meningkatnya promosi daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Meningkatnya kinerja pelayanan Badan Penghubung		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Penghubung		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana program dan kegiatan

Rencana program dan kegiatan yang disertai kebutuhan pendanaan yang menjadi tanggung jawab Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat serta pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Berikut ini merupakan tabel rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Anggaran 2018 - 2023

Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikator Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	B Nilai	BB Nilai	11.367.000.000	A Nilai	13.133.500.000	A Nilai	14.202.000.000	-	38.702.500.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		BB Nilai		A Nilai		AA Nilai		AA Nilai			
				Indeks Kepuasan Masyarakat	B Nilai 94 %	100%		100%		100%		100%			
		5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	262.000.000	7 Dokumen	325.000.000	7 Dokumen	387.000.000	7 Dokumen	974.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	42.000.000	2 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	47.000.000	6 Dokumen	134.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT
		5.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	45.000.000	4 Dokumen	55.000.000	4 Dokumen	135.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				RKA-SKPD											
		5.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	2 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	45.000.000	4 Dokumen	55.000.000	4 Dokumen	135.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	-	2 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	45.000.000	4 Dokumen	55.000.000	4 Dokumen	135.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				DPA-SKPD											
		5.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	2 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	45.000.000	4 Dokumen	55.000.000	4 Dokumen	135.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	2 Laporan	4 Laporan	45.000.000	4 Laporan	55.000.000	4 Laporan	65.000.000	4 Laporan	165.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
		5.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 Laporan	35.000.000	4 Laporan	45.000.000	4 Laporan	55.000.000	4 Laporan	135.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.445.000.000	-	5.146.000.000	-	5.819.000.000	-	15.410.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	32 Orang/Bulan	4.200.000.000	36 Orang/Bulan	4.800.000.000	40 Orang/Bulan	5.400.000.000	40 Orang/Bulan	14.400.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000	18 Dokumen	290.000.000	24 Dokumen	340.000.000	24 Dokumen	830.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	6 Laporan	45.000.000	12 Laporan	56.000.000	18 Laporan	79.000.000	18 Laporan	180.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	540.000.000	-	839.000.000	-	1.095.000.000	-	2.474.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	22 Dokumen	120.000.000	26 Dokumen	150.000.000	30 Dokumen	200.000.000	30 Dokumen	470.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	12 Laporan	100.000.000	18 Laporan	150.000.000	24 Laporan	200.000.000	24 Laporan	450.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12 Laporan	100.000.000	18 Laporan	180.000.000	24 Laporan	250.000.000	24 Laporan	530.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12 Laporan	100.000.000	18 Laporan	170.000.000	24 Laporan	230.000.000	24 Laporan	500.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	12 Dokumen	120.000.000	18 Dokumen	189.000.000	24 Dokumen	215.000.000	24 Dokumen	524.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	-	-	141.000.000	-	264.000.000	-	393.000.000	-	798.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32 Paket	40 Paket	25.000.000	45 Paket	50.000.000	50 Paket	75.000.000	50 Paket	150.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	6 Dokumen	45.000.000	12 Dokumen	77.000.000	18 Dokumen	110.000.000	18 Dokumen	232.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	1 Orang	6 Orang	35.000.000	12 Orang	65.000.000	18 Orang	100.000.000	18 Orang	200.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan											
		5.07.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	6 Orang	36.000.000	12 Orang	72.000.000	18 Orang	108.000.000	18 Orang	216.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	527.000.000	-	652.000.000	-	813.000.000	-	1.972.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	30 Paket	55.000.000	36 Paket	65.000.000	45 Paket	75.000.000	45 Paket	195.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10 Paket	78.000.000	15 Paket	99.000.000	20 Paket	120.000.000	20 Paket	297.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	15 Paket	40.000.000	20 Paket	58.000.000	25 Paket	80.000.000	25 Paket	178.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	6 Paket	99.000.000	9 Paket	115.000.000	12 Paket	170.000.000	12 Paket	384.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	18 Paket	52.000.000	22 Paket	65.000.000	29 Paket	88.000.000	29 Paket	205.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	6 Dokumen	20.000.000	8 Dokumen	30.000.000	8 Dokumen	65.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
				Perundang-Undangan yang Disediakan											
		5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	55 Laporan	188.000.000	62 Laporan	230.000.000	70 Laporan	250.000.000	70 Laporan	648.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Barang Milik Daerah	-	-	4.058.000.000	-	4.179.500.000	-	3.606.000.000	-	11.843.500.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	2 Unit	2.000.000.000	2 Unit	2.000.000.000	2 Unit	2.000.000.000	2 Unit	6.000.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	2 Unit	1.400.000.000	2 Unit	1.400.000.000	1 Unit	700.000.000	1 Unit	3.500.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	5 Paket	200.000.000	5 Paket	200.000.000	5 Paket	200.000.000	5 Paket	600.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	12 Unit	153.000.000	18 Unit	229.500.000	24 Unit	306.000.000	24 Unit	688.500.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	20 Unit	155.000.000	25 Unit	200.000.000	30 Unit	250.000.000	30 Unit	605.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	6 Unit	150.000.000	6 Unit	150.000.000	6 Unit	150.000.000	6 Unit	450.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp			target	Rp	target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
		5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	665.000.000	-	815.000.000	-	970.000.000	-	2.450.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT					
		5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24 Laporan	15.000.000	36 Laporan	25.000.000	48 Laporan	40.000.000	48 Laporan	80.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT					
		5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan	15 Laporan	550.000.000	20 Laporan	590.000.000	24 Laporan	630.000.000	24 Laporan	1.770.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT					
		5.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6 Laporan	50.000.000	12 Laporan	100.000.000	15 Laporan	150.000.000	15 Laporan	300.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT					
		5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6 Laporan	50.000.000	10 Laporan	100.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	300.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT					
		5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan/Rehabilitasi	-	-	729.000.000	-	1.908.000.000	-	2.005.000.000	-	2.781.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT					
		5.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	7 Unit	450.000.000	7 Unit	550.000.000	8 Unit	600.000.000	8 Unit	1.600.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT					
		5.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	7 Unit	40.000.000	7 Unit	45.000.000	8 Unit	65.000.000	8 Unit	150.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT					
		5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15 Unit	79.000.000	20 Unit	250.000.000	24 Unit	250.000.000	24 Unit	354.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT					
		5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6 Unit	120.000.000	8 Unit	1.000.000.000	10 Unit	1.000.000.000	10 Unit	484.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT					
		5.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6 Unit	30.000.000	6 Unit	45.000.000	6 Unit	65.000.000	6 Unit	140.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT					
		5.07.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	14 Unit	10.000.000	16 Unit	18.000.000	18 Unit	25.000.000	18 Unit	53.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT					
		5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks Kepuasan Masyarakat	94%	100%	1.965.000.000	100%	2.585.000.000	100%	3.120.000.000	100%	7.670.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT					
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		BB Nilai		BB Nilai		A Nilai		A Nilai							
				Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	B Nilai B Nilai	BB Nilai		A Nilai		AA Nilai		AA Nilai							
		5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Layanan Penghubung	-	-	1.965.000.000	-	2.585.000.000	-	3.120.000.000	-	7.670.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	6 Laporan	1.100.000.000	12 Laporan	1.500.000.000	18 Laporan	1.900.000.000	18 Laporan	4.500.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	2 Laporan	12 Laporan	215.000.000	14 Laporan	235.000.000	18 Laporan	250.000.000	18 Laporan	700.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
		5.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	22 Laporan	29 Laporan	650.000.000	32 Laporan	850.000.000	35 Laporan	970.000.000	35 Laporan	2.470.000.000	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
							13.332.000.000	15.718.500.000		17.322.000.000		46.372.500.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan secara terus menerus selama kurun waktu 5 (lima tahun) dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B Nilai	BB Nilai	A Nilai	AA Nilai	AA Nilai
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Indeks RB	B Nilai	BB Nilai	A Nilai	AA Nilai	AA Nilai
4.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	B Nilai	BB Nilai	A Nilai	AA Nilai	AA Nilai
5.	Jumlah kegiatan promosi daerah, pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	2 Kali	12 Kali	18 Kali	24 Kali	24 Kali
6.	Nilai SAKIP	B Angka	BB Angka	A Angka	AA Angka	AA Angka
7.	Nilai SAKIP	B Nilai	BB Nilai	A Nilai	AA Nilai	AA Nilai
8.	Persentase fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD dan pejabat daerah	94 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9.	Persentase koordinasi antar lembaga dengan K/L lainnya	94 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10.	Persentase PAD atas pemanfaatan sarana prasarana Badan Penghubung	180 %	200 %	250 %	300 %	300 %

BAB VIII PENUTUP

Untuk mencapai kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan berbagai faktor, termasuk didalamnya aspek kelembagaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan dapat berperan maksimal apabila faktor-faktor pendukung dapat bekerja secara maksimal. Oleh karena itu Dokumen RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) merupakan dokumen yang akan mendukung pencapaian kinerja yang keberhasilannya ditentukan oleh banyak faktor terutama aspek kualitas Sumber Daya Manusia. Mengingat aspek SDM sangat penting dan paling menentukan terhadap keberhasilan dan kualitas kerja lembaga, maka sangat penting untuk memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- Etos kerja, kedisiplinan dan loyalitas
- Kemampuan teknis dan profesionalisme
- Mekanisme penghargaan dan sanksi yang proposional
- Aspek kesejahteraan dan pengembangan karier

Dalam kerangka perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RENCANA KERJA (RENJA) Tahunan dan pedoman dalam upaya peningkatan kinerja lembaga.

Jakarta, 31 Maret 2023

Kepala Badan Penghubung
Provinsi Kalimantan Barat



ABDUL GANI, S.H.

Pembina (IV/a)

NIP.197208211997031006